

## PEREMPUAN DAN KETERWAKILANNYA DALAM POLITIK PRAKTIS

Rifa Hidayah, M.Si  
Dosen Fakultas psikologi UIN Malang

### Abstract

*Woman's participation in political arena is facing marginalization. Although 30% regulation of women's proportion in the parlementary has been implemented in 2004 general election, woman's representative in political practice is still low. It just reached 11,8% from the targeted proportion (30%). For the next 2009 general election, all parties have not fulfilled the 30% proportion.*

*The effort to reach 30% proportion of women's representative in the parliament should be implemented with the fact that women voter number is higher than men voter number. Through socialization of politics and women's representative issues, discrimination towards women's right maybe eliminated. Designing gender perspective curriculum and encouraging academicians to have gender sensitivity are important effort too. Women are also expected to develop and to improve their capabilities including their intelektual and personal quality will support women's role significantly in political arena.*

**Kata Kunci:** Perempuan, keterwakilan perempuan dalam parlemen, politik praktis.

### Pendahuluan

Munculnya gerakan emansipasi perempuan bertujuan menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, salah satunya adalah sebagai upaya untuk menanggulangi adanya diskriminasi menuju pada kesetaraan gender, apalagi permasalahan tersebut sering dihadapi oleh pemerintah di berbagai negara pada semua sektor tak terkecuali sektor politik.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan hukum di Indonesia mengisyaratkan bahwa Indonesia tidak membedakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat 3 dengan tegas menjelaskan: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidaklah semulus yang diidamkan, masih terjadi preferensi terhadap laki-laki dalam beberapa hal, yang berdampak pada

perempuan akibat negara tidak begitu memperdulikan nasib perempuannya khususnya penentuan dan pengambilan kebijakan politis.<sup>1</sup>

Perlakuan diskriminatif pada perempuan dapat dilihat pada peran perempuan dan keterwakilannya dalam parlemen/politik praktis yang masih minim. Data Badan Pusat Statistik tahun 1991, menunjukkan bahwa jumlah perempuan di Indonesia mencapai sekitar 51 persen dari jumlah seluruh penduduk Indonesia, namun keterlibatan perempuan di politik formal masih sangat rendah. Posisi keterwakilan perempuan Indonesia di parlemen hingga saat ini memang rendah jika dibandingkan rata-rata prosentase perempuan di Asia (14,9 persen), negara-negara di Afrika dan Sub-Sahara (12,1 persen), atau di negara-negara Pasifik (11,5 persen), dan Amerika Serikat (13,3 persen). Menurut data statistik (2003)<sup>2</sup> tentang kecenderungan perempuan dalam kehidupan publik dalam tiga periode terakhir (tahun 1987, 1995, dan 2001) yang dikeluarkan oleh *United Nations Statistics Division* secara umum memperlihatkan perkembangan positif dalam representasi perempuan di parlemen berbagai negara di dunia, namun sayangnya Indonesia tidak termasuk dalam kelompok negara-negara yang menunjukkan perkembangan positif ini.

Rendahnya keterwakilan perempuan terlihat dari pelaksanaan di beberapa pemilu, tercatat pada Pemilu 1999, keterwakilan perempuan mengalami penurunan dan peran perempuan dalam pemilu tahun 1999 masih kecil, di mana dari 48 partai politik peserta pemilu, hanya terdapat sebanyak 23 partai yang memiliki departemen urusan perempuan.

Marginalisasi perempuan dalam politik dapat dilihat, misalnya dari data badan pusat statistik (BPS) jumlah perwakilan Rakyat RI periode 1999-2004 adalah 9,2%, dan periode DPR RI tahun 2004-2009, menunjukkan bahwa pada pemilu 1999 jumlah perempuan dalam parlemen dan pada pemilu tahun 2004 jumlah perempuan dalam parlemen mencapai 11,8%. Selain itu Meskipun dari daftar caleg tetap (DCT) pemilu 2009 jumlah caleg perempuan yang berada di tiga nomor teratas mencapai 58%, namun ternyata belum semua partai memenuhi kuota 30%, tercatat ada 6 partai dan di antara 38 partai politik peserta pemilu 2009, PDI dan PKS paling sedikit menempatkan caleg perempuan mereka di nomor puncak (Caleg wanita, Jawa pos, 1-

---

<sup>1</sup> Seda, Ari, 2004. dalam Cokorda Yudistira, *Perempuan Indonesia (masih) Minoritas dalam Politik*. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0207/22/dikbud/pere36.htm>

<sup>2</sup> Data statistik, 2003. dalam Budi Rajab, *Perempuan dalam Politik*. <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1003/22/0801.htm>

11-2008, 2)<sup>3</sup>. Di berbagai daerah Kota Malang misalnya, data DCT pemilu 2009 yang akan datang dari 790 kuota jumlah calon legeslatif laki-laki mendominasi 524 sedangkan caleg perempuan berjumlah 266 (Radar Malang, 28-10-08, hal. 36). Data ini menunjukkan bahwa secara statistik, meskipun secara kuantitas perempuan mengalami peningkatan keterwakilan di parlemen akan tetapi peningkatan tersebut belum sesuai dengan harapan, perempuan tetaplah masih berada di pinggir politik. Masih banyak perempuan yang belum berkesempatan duduk di parlemen, dan bahkan perempuan yang berniat untuk terjun dalam dunia politik mendapatkan tantangan yang cukup berat, baik dari lingkungan yang sangat *male dominated* maupun dari kebijakan-kebijakan yang tidak berperspektif perempuan.

Sudah banyak dilakukan usaha-usaha untuk mencapai keseimbangan antara laki-laki dan perempuan di semua sektor, termasuk di sektor publik, salah satunya melalui perjuangan politik untuk membela kepentingan-kepentingan kaum perempuan, dengan dikeluarkannya keputusan dalam batang tubuh UU Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Pasal 65 Ayat 1 menegaskan keterwakilan perempuan di dalam nominasi anggota DPR, DPR Propinsi dan DPR Kabupaten/kota. *"Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen...."*

Diberlakukan kuota 30% bagi perempuan ternyata belum menguntungkan sepenuhnya bagi perempuan, terlihat bahwa data dari hasil pemilu tahun 2004 menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah wakil perempuan dari pemilu tahun 1999 akan tetapi keterwakilan perempuan dalam parlemen belum sepenuhnya tercukupi, hanya sekitar 11, 8%, dan angka ini secara kuantitatif masih jauh dari harapan adanya keterwakilan perempuan dalam parlemen, dan untuk pemilu 2009 belum semua partai memenuhi kuota 30% (Caleg Wanita, 2008).<sup>4</sup> Salah satu sebab dikotomi tentang ruang dan peranan perempuan menurut Seda,<sup>5</sup> adalah faktor yang tidak menguntungkan perempuan Indonesia untuk masuk ke dunia politik, dan kendala perempuan untuk masuk ke wilayah publik adalah sifat dari sistem pemilihan yang belum berpandangan gender.

---

<sup>3</sup> Caleg wanita di nomor 1, PDIP,PKS paling sedikit, Jawapos, 1 november 2008, hal 2)

<sup>4</sup> Caleg wanita,op.cit. hal 2

<sup>5</sup> Seda, Ari, 2004. Op.cit.36

Untuk konteks Indonesia, perempuan akan masih tetaplah berada di titik pinggir politik. Ada beberapa argumen, di antaranya : Pertama, dari segi pemilihan umum, belum ditemukan sungguh-sungguh sistem pemilihan umum yang berpandangan gender. Kedua, tatanan budaya politik kita belum memberikan kepercayaan kepada perempuan. Ketiga, perempuan sendiri masih merasa dirinya tidak pantas untuk maju. Keempat, partai politik sendiri masih didominasi oleh laki-laki, dan laki-laki tidak rela untuk memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan (Somasir, 2003)<sup>6</sup>. Di panggung politik realitanya laki-laki masih sangat dominan, karena itu kemungkinan besar, perempuan masih tetap berada di pinggir politik.

### **Keterwakilan Perempuan dalam Politik Praktis**

Keterwakilan perempuan dalam Politik praktis dimaknai jumlah secara proporsional yang telah mewakili secara representatif jumlah perempuan yang duduk di parlemen/lembaga legislatif sebagai dewan perwakilan rakyat/majelis permusyawaratan rakyat.

Keterwakilan perempuan di politik praktis/parleman memiliki hambatan internal dan eksternal<sup>7</sup>. Hambatan internal adalah datang dari perempuan sendiri yaitu kemauan dan kesediaan untuk berkiprah di partai politik. Dan hambatan eksternal berasal dari kaum laki-laki dan sistem yang berlaku dalam masyarakat. Hambatan kultural yaitu budaya *patriarkhis*. Hasil penelitian Hatfield, E. Sparechter S.<sup>8</sup> tentang peran gender kaitannya dengan budaya menunjukkan bahwa: 1). gender mempunyai pengaruh yang signifikan dalam pemilihan pasangan, di mana laki-laki lebih memilih daya tarik fisik, sementara perempuan lebih memilih intelegensi, ambisi, potensi, uang dan status, serta 2). gender mempengaruhi indeks pemilihan yang menunjukkan bahwa perempuan lebih memilih. Pengaruh dari budaya ternyata perbedaan gender lebih besar di Jepang dibanding USA dan Rusia.

---

<sup>6</sup> Somasir, Osbin. 2003. *Pemilu 2004 Perempuan Masih Berada di Pinggiran*. Jakarta: Sinar Harapan

<sup>7</sup> Redjeki, Sri. 2003. Menteri Pemberdayaan Perempuan. *kebijakan keenterian pembudayaan perempuan dalam peningkatan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan*. Semlokas

<sup>8</sup> Hatfield, E. and Sprecher, S. 1995. Men's and Woman's Preferences in Marital Partners In The United States, Russia, and Japan. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 26 (6), hlm.730.

William and Best (1990)<sup>9</sup> melakukan penelitian pada 14 negara dengan menggunakan penelitian skala ideologi peran gender. Penelitian ini didasarkan pada dua sifat berlawanan yang “tradisional” (masih menganut suatu keyakinan yang normatif, tentang seperti apa seharusnya laki-laki dan perempuan, dan apa yang seharusnya laki-laki dan perempuan lakukan), dan “*egalitarian*” tidak membedakan peran gender. Hasilnya menunjukkan bahwa skor egalitarian yang tinggi terdapat di negara Netherland, German, Firlandia, dan Inggris. Sementara skor tradisional yang rendah terdapat di negara Nigeria, Pakistan, dan India. Hasil penelitian ini ternyata menunjukkan bahwa perempuan lebih cenderung memiliki pandangan “*egalitarian*” dibandingkan dengan laki-laki. Di samping itu bahwa makin tinggi kemakmuran dan kecenderungan budaya *individualistic* lebih memiliki pandangan “*egalitarian*” yang tinggi sehingga pada budaya tersebut banyak dijumpai perempuan yang berpendidikan tinggi dan bekerja di luar rumah. Kondisi ini menyebabkan peran gender secara tradisional semakin lama semakin menghilang.

Menurut Nurdin<sup>10</sup> faktor yang menentukan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, ada tiga faktor, yaitu: a) faktor budaya yang ditumbuhkembangkan cenderung berpengaruh negatif terhadap keterwakilan perempuan di dunia politik, b) tingkat pendidikan dan keterampilan perempuan serta c) sistem pemilu dan sistem kuota.

Berbagai pendapat tersebut secara umum dapat dilihat bahwa faktor keterwakilan perempuan di parlemen/politik praktis di pengaruhi oleh banyak hal yaitu: (a) kendala internal dari perempuan, yaitu kepercayaan diri perempuan sendiri yang rendah dan perempuan masih merasa tidak pantas untuk maju dalam kancah politik, hal ini karena norma lebih berorientasi pada laki-laki dibandingkan pada perempuan serta struktur yang didominasi laki-laki sehingga dapat mengurangi kepercayaan diri dan partisipasi perempuan dalam politik. Kendala juga muncul dari kesalahan perempuan sendiri, seperti kurang pendidikan, kurang wawasan, kurang kompetitif sehingga tidak memungkinkan terjun ke dunia politik, (c) kendala eksternal dari perempuan: kurangnya pelatihan dan pendidikan perempuan yang berorientasi kepemimpinan. Mobilisasi dukungan media tidak cukup. Serta secara sosial masyarakat juga belum memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada

---

<sup>9</sup> William, J.E. & Deborah L.B. (1990). *Sex and Psyche : Gender and Self Viewed Cross Culturally*. California : Sage Publications. Inc.

<sup>10</sup>Nurliah Nurdin 2003. *Menggugat Marjinalisasi Perempuan di Parlemen*. [Http://situs.kesrepro.info/gendervaw/okt/2002/gendervaw01.htm](http://situs.kesrepro.info/gendervaw/okt/2002/gendervaw01.htm).

perempuan, (c) hambatan kultural. Faktor budaya masyarakat sangat menentukan terhadap adanya diskriminasi perempuan dalam berpolitik, seperti pandangan kebanyakan masyarakat, budaya masih mendiskriminasi terhadap perempuan. Saat ini budaya yang ada yaitu budaya patriarkhisnya menganggap dunia politik adalah dunia laki-laki, dan dunia perempuan tersingkir dari dunia tersebut. Budaya politik sekarang masih belum memberikan kepercayaan kepada perempuan, dan partai politik sendiri didominasi oleh laki-laki, serta laki-laki tidak rela untuk memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk masuk pada partai politik, (d) sistem pemilu dan organisasi politik, yaitu kurangnya dukungan perempuan dari partai politik dan kurangnya koordinasi dan dukungan jaringan antara anggota parlemen perempuan dalam organisasi publik lainnya. Sistem pemilu yang kurang kondusif dan belum berpandangan gender, begitu pula sistem kuota tidak sepenuhnya menjamin keterwakilan perempuan. Selain itu juga karena bidang politik/partai politik yang masih menggagap bahwa parlemen adalah wilayah kerja laki-laki, dan bukan perempuan.

### **Studi pembagian kerja laki-laki dan perempuan konsteks budaya**

Relasi beban kerja antar laki-laki dan perempuan menjadi dasar dari pola dalam pandangan lapangan kerja tak terkecuali di panggung politik. Kalau dalam pandangan masyarakat tradisional dikenal adanya pembagian kerja secara seksual, laki-laki sebagai pemburu dan perempuan sebagai pengasuh, maka masih juga dijumpai dalam masyarakat modern. Dalam dunia sains misalnya sains perempuan sebagai operator laboratorium dan laki-laki sebagai saintis. Pada kaum laki-laki juga cenderung mengembangkan sikap kepemimpinan. Hal ini menjadikan posisi laki-laki lebih diuntungkan daripada perempuan, laki-laki mendominasi perempuan.

Banyak faktor yang mempengaruhi konsep gender dalam diri individu. Faktor ini bisa ditinjau dari teori biologis, *social learning* dan kognitif. Durkin<sup>11</sup> mengemukakan dari segi biologis terdapat perbedaan laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini dikarenakan adanya hormon tertentu yang mempengaruhi perilaku seorang/jenis kelamin tertentu (laki-laki: testosteron dan perempuan: estrogen). Di samping itu laki-laki dari segi struktur dan organ tubuh secara alamiah lebih kuat dari perempuan (seperti paru dan jantung yang lebih besar). Berdasarkan kondisi yang alamiah ini secara tidak langsung menempatkan diri laki-laki sebagai orang yang menguasai dan melindungi. Sedangkan perempuan secara alamiah memiliki

---

<sup>11</sup> Durkin, K. 1995. *Development Social Psychology*, USA : Blackwell Publisher, Inc.

kemampuan untuk mengandung, melahirkan dan menyusui. Sehingga mentakdirkan perempuan untuk memelihara dan merawat anak. Hasil penelitian Birenbaum<sup>12</sup> menunjukkan terhadap masalah atribut kesuksesan dan kegagalan dalam mata pelajaran matematika tidak perlu berbeda dalam masalah gender dan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Namun yang berbeda justru dalam masalah budaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Marry<sup>13</sup> terhadap budaya Hispanik dan Anglo tentang etnis, gender dan penilaian tentang agresi ditemukan bahwa khususnya permasalahan mengenai gender nampaknya lebih konsisten untuk lintas budaya. Hal ini berarti terhadap kedua budaya Hispanik dan Anglo rata-rata laki-laki lebih mendukung perilaku agresif. Sedangkan perempuan lebih memperlihatkan pada pengendalian diri. Artinya bahwa Etnisitas, gender, sangat mempengaruhi interpretasi tentang agresi, dan pembentukan peran gender tidak hanya sekedar mencontoh dari model saja, tetapi juga tergantung pada norma-norma lingkungan dan budaya. Penelitian ini senada dengan beberapa penelitian yang ditemukan oleh Matsumoto<sup>14</sup> bahwa selain tingginya hormon testosteron pada laki-laki yang memberikan sumbangan yang positif pada tingkat agresifitas sampai pada tingkat tertentu, budaya dan lingkungan juga ikut berperan dalam pembentukan perilaku agresi.

Lain halnya yang dikemukakan oleh Kohlberg, 1966<sup>15</sup> bahwa anak memperoleh konsep tentang gender sebagai sesuatu yang menetap merupakan bagian dari perkembangan kognitifnya. Pembentukan konsep gender merupakan proses pengorganisasian beberapa persepsi, sikap, nilai dan perilaku. Pembentukan ini melalui tiga tahap yaitu: 1) *gender stability*. Anak mengenal dirinya sesuai dengan label yang diberikan laki-laki/perempuan. Anak semakin menyadari bahwa sebagai laki-laki/perempuan merupakan bagian dari kelompok gendernya sendiri. Anak mulai menemukan individu dalam kategori yang sama terhadap gender yang sama seperti

---

<sup>12</sup> Birenbaum, M. & Kramer, R, 1995. Gender and Ethnic-Group Differences In Causal Attribution For Success and Failure In Mathematics and Language Examinations. *Journal of Cross Cultural Psychology*. 26 (3), 343-359.

<sup>13</sup> Marry B. Hariss, 1995. Ethnicity, Gender and Evaluation of Aggression, *Journal : Behavior*, 21, 345-357.

<sup>14</sup> Matsumoto, David 1996, *Cross Cultural Psychology*, California: Brook Cole Publishing Company, hlm.220.

<sup>15</sup> Kail, R.V; Wick. R & Nelson. 1993. *Development Psychology*, USA : Prentice-Hall. Inc.

istilah laki-laki, perempuan. Namun pemahaman tersebut masih sederhana; 2) *gender consistency*. Status atau label yang diberikan pada anak tidak akan berubah selamanya. Laki-laki tidak akan berubah jadi perempuan dan sebaliknya. Kesadaran anak semakin tumbuh tentang kelompok gendernya dalam bentuk fisik seperti permainan dan pakaian, dan 3) *gender constancy*. Setelah terbentuknya *gender constancy* maka anak akan melengkapi identitas gendernya yang semakin stabil dan konsisten. Dalam arti ini pemahaman anak tentang konsep gender semakin permanen. Pemahaman ini semakin meningkat ketika anak berinteraksi dengan lingkungannya tentang peranan gender. Proses ini biasanya muncul pada anak yang berusia 6 atau 7 tahun.

Gender baru berkembang pada masa kanak-kanak yaitu ketika ia mulai bersosialisasi dengan lingkungan dan mulai mempelajari perilaku dan pola aktivitas yang sesuai dengan jenis kelaminnya. budaya memberikan pengaruh pada setiap kehidupan manusia termasuk pengaruh budaya terhadap perilaku yang berkaitan dengan jenis kelamin dan gender, sebab bayi hanya memiliki sex dan bayi sama sekali belum mengenal budaya tempat mereka dilahirkan<sup>16</sup>.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Astutik dan Sastriyani, dkk<sup>17</sup> juga menunjukkan bahwa perempuan berperan disektor publik dialokasikan pada posisi rendah dibandingkan laki-laki. Perempuan mempunyai akses dan kontrol terhadap barang-barang bernilai lebih rendah dibandingkan laki-laki, perempuan tidak pernah dialokasikan mempunyai tanah atau mobil. Selain itu isi pelajaran buku bahasa Indonesia untuk SD, SLTP, dan SMU yang bias gender akan mempengaruhi pandangan anak tentang posisi sosial politik perempuan baik di rumah tangga maupun di masyarakat.

Saatnya perempuan berkiprah secara berkualitas dengan karya yang sangat diidamkan masyarakat dalam segala bidang termasuk dalam politik praktik, dan karenanya pandangan bahwa perempuan tidak perlu bekerja apalagi mengambil peran penting dalam bidang politik perlu ditepis bersama. Secara nyata saat-saat ini sudah mulai terlihat adanya kiprah perempuan di segala sektor, seperti sejumlah perempuan yang mencuat dalam bidang publik, walaupun jumlahnya tidak banyak, contohnya Indonesia pernah memiliki presiden perempuan, menteri pemberdayaan perempuan,

---

<sup>16</sup> Matsumoto, David 1996, *Cross Cultural Psychology*, California: Brook Cole Publishing Company, hlm.220

<sup>17</sup> Astutik, Mary dan Satriyani, Harsiti. 1997. Bias gender dalam buku pelajaran bahasa Indonesia. *Jurnal Gender*, Vol. 1 No. 1 Juli. Yogyakarta: PSG UGM.

menteri kesehatan, bupati-kepala desa, kepala sekolah, pimpinan pondok pesantren dan masih banyak lagi.

### **Pembahasan**

Secara kuantitatif jumlah penduduk perempuan Indonesia lebih besar dibandingkan jumlah laki-laki, akan tetapi jumlah keterwakilan perempuan diparlemen lebih rendah di banding laki-laki. Menurut hasil penelitian, partisipasi politik perempuan di negara-negara berkembang cenderung rendah dibandingkan laki-laki. Salah satu sebab karena perempuan lebih banyak terlibat dengan urusan rumah tangga dari pada urusan politik, sementara sosialisasi perempuan secara politis cenderung menggiring perempuan mendapatkan status tertentu tanpa usahanya sendiri.

Berdasarkan segi kesetaraan – keterwakilan dari perempuan, untuk perempuan – tidak ada bedanya dengan tuntutan atas keterwakilan dari rakyat untuk rakyat, merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 dengan tegas menjelaskan : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Karena itu tercapainya persamaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan penentu kebijakan merupakan prasyarat bagi berfungsinya demokrasi. Untuk waktu yang sangat singkat diperlukan pendidikan politik bagi perempuan yang berperspektif gender.

Hak politik juga harus sangat diperhatikan, perempuan harus dianggap sebagai suatu kesatuan dengan hak asasi manusia, oleh karena itu hak politik perempuan tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia “Uni Antar Parlemen” (*inter parliamentary union*). (Deklarasi New Delhi, 1997).

Lebih lanjut pola pendidikan politik perlu diterapkan untuk mewujudkan hak asasi perempuan tersebut, khususnya hak politik (ICESCR), mendorong perempuan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan terlibat dalam proses politik, menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, menjadi anggota partai politik, membaca dan memberi opini politik, melakukan petisi, demonstrasi atau aksi damai, serta memboikot produk tertentu.

Ditinjau dari nilai-nilai budaya bangsa tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang perempuan lebih rendah dari pada laki-laki dalam masalah politik, hak, kemampuan, prestasi dan sebagainya. Artinya bahwa sebagian lingkungan sosial masyarakat masih lebihkan laki-laki dari perempuan. Hal ini

terlihat dari kesempatan berpolitik, kesempatan kerja, upah yang diterima, lapangan kerja yang dimasuki, dan hubungan dalam sosial masyarakat. Dalam hubungan sosial kemasyarakatan dan aktivitas perempuan lebih banyak dibatasi oleh nilai-nilai budaya.

Tinjauan dari segi teori *social learning* dikemukakan oleh Bandura (Durkin, 1995)<sup>18</sup> bahwa berkembangnya perbedaan peranan gender dalam diri individu sebagian besar dipengaruhi oleh pengalaman belajar individu yang diperolehnya dari lingkungan seseorang seperti orang tua, guru, teman, media masa dan norma budaya masyarakat. Sebagaimana hasil penelitian Alaska, Anderson, Collins dan Schemitt<sup>19</sup> menunjukkan bahwa suatu media yang berperan dalam pembentukan konsep gender adalah televisi, melalui program-program yang ditayangkan televisi dengan berbagai perang gender yang diperlihatkan semuanya akan menjadi model dan akan menjadi bagian dari perilaku anak jika lingkungan mendukungnya. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa program televisi berpengaruh terhadap ketepatan gender anak-anak di Springfield dan Massachusetts. Pengaruh ini terutama sekali terhadap laki-laki, dan program yang paling disukai adalah “*sport dan action*”.

Ada dua proses penting yang dialami individu ketika berinteraksi dengan lingkungan yaitu “*reinforcement dan modeling*”. Lebih lanjut dijelaskan selama dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, orang tua dalam membentuk kepribadian anak cenderung untuk mengarahkan pada jenis kelamin yang dimiliki. Besarnya pengaruh orang tua ini ditegaskan lagi oleh Turner<sup>20</sup> bahwa kepribadian, sikap dan perilaku orang tua juga berpengaruh terhadap pembentukan konsep gender dalam diri anak apakah sebagai maskulin, feminim atau penggabungan keduanya (*androgini*).

Begitu pula dalam dunia politik, persepsi gender masih memandang perempuan dalam hak berpolitik lebih rendah dari laki-laki, termasuk memandang rendah keterwakilan perempuan dalam parlemen, terbukti dengan masih rendahnya

---

<sup>18</sup>Durkin, K. 1995. *Development Social Psychology*, USA : Blackwell Publisher, Inc.

<sup>19</sup> Alaska, D.L ; Anderson, D.R ; Collins, P.A. & Schemitt, K.L. (1995). *Gender Constancy and Television Viewing*. *Development Psychology*, 31 (5), 773-780.

<sup>20</sup> Turner. P.J. & Gervai, J. 1995. *A Multidimensional Study of Gender Typing in Prescholl Children and Their Parent : Personality, Attitudes, Preferences, Behavior and Cultural Differences*, *Developmental Psychology*. 31 (5), 759-772.

jumlah keterwakilan perempuan dalam parlemen. Hasil penelitian Hidayah<sup>21</sup> menunjukkan bahwa perempuan mempunyai persepsi yang lebih positif dibanding laki-laki dalam memandang keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Permasalahan yang menyangkut keterwakilan perempuan di parlemen juga berakar dari gender yang *patriarkhis*, dan lebih pada permasalahan kesetaraan gender. Dan kesetaraan gender memiliki hubungan dengan pembentukan peran jenis yang dimiliki oleh individu.

Upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam politik menjadi tanggung jawab kita semua, terutama partai-partai politik. Menurut beberapa tokoh gender, bahwa ada tiga faktor yang menentukan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif; (a) faktor budaya yang ditumbuh kembangkan cenderung berpengaruh negatif terhadap keterwakilan perempuan di dunia politik, (b) tingkat pendidikan dan keterampilan perempuan, (c) sistem pemilu dan sistem kuota. Aspek lain yang secara signifikan menentukan peningkatan keterwakilan perempuan adalah peran organisasi dan aktivis pembela hak perempuan dalam partai politik.

Peran signifikan perempuan dalam proses politik diharapkan pula akan lebih memperhatikan kebutuhan perempuan (*gender budgetting*) dan mempengaruhi kebijakan di segala sektor yang mengandung sensitivitas gender, serta akan meningkatkan kualitas kebijakan publik yang dikeluarkan. Karena proses pengambilan keputusan yang tadinya didominasi laki-laki akan diwarnai dengan pertimbangan-pertimbangan menyentuh kepentingan dan kebutuhan rakyat yang lebih luas, yaitu rakyat yang termarginalkan, termasuk kepentingan perempuan pada bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.

## **KESIMPULAN**

Demi tercapainya keterwakilan perempuan dalam parlemen memang diperlukan adanya usaha keras dari semua pihak, termasuk pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan strategis menyangkut kehidupan banyak pihak. Karena itu diharapkan bagi para pembuat kebijakan untuk memperhatikan dan melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan strategis untuk menghindari adanya bias gender. Dari pihak partai mestinya lebih memperhatikan aspirasi rakyat secara menyeluruh tak terkecuali memperhatikan kebutuhan perempuan, agar tidak terjadi diskriminasi pada perempuan di semua sektor. Sosialisasikan politik dan isu-isu keterwakilan perempuan secara menyeluruh kepada masyarakat, agar masyarakat

---

<sup>21</sup> Hidayah.2007. Perbedaan Persepsi Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen di tinjau dari Jenis Kelamin. UIN Malang.

memahami dan melihat secara objektif kepada laki-laki dan perempuan yang berkualitas saja yang pantas menjadi wakil rakyat, dan masyarakat berperan memberikan dorongan kepada perempuan dan memberikan kepercayaan yang sama kepada semua masyarakat baik laki-laki dan perempuan. Dan bagi perempuan sendiri hendaknya perempuan berbenah diri tampil sebaik-baiknya untuk melangkah disertai kualitas tinggi untuk menjadi wakil rakyat di parlemen. Bagi lembaga pendidikan perlu mewujudkan kesetaran gender dimulai dari sistem pembelajaran tentang gender yang dimasukkan dalam kurikulum agar lembaga pendidikan dan civitas akademika lebih sensitif terhadap permasalahan gender.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alaska, D.L ; Anderson, D.R ; Collins, P.A. & Schemitt, K.L. (1995). *Gender Constancy and Television Viewing*. *Development Psychology*, 31 (5), 773-780.
- Astuti, M. dkk. (1997). *Studi Gender, Profil Sarjana di Kota Yogyakarta*, Yogyakarta : PSW UGM.
- Astutik, Mary dan Satriyani, Harsiti. 1997. Bias gender dalam buku pelajaran bahasa Indonesia. *Jurnal Gender*, Vol. 1 No. 1 Juli. Yogyakarta: PSG UGM.
- Berry, J., et al., 1998. *Cross-cultural Psychology: Research & Application*, Cambridge, Cambridge University Press, hlm. 60-64.
- Bernd, T.J. and Heller, K.A. 1996. Gender stereotyped sosial inferences: Developmental study. *Jurnal of Personality and Sosial Psychology*. Vol. 50 (5): 889-898.
- Birenbaum, M. & Kramer, R, 1995. Gender and Ethnic-Group Differences In Causal Attribution For Success and Failure In Mathematics and Language Examinations. *Journal of Cross Cultural Psychology*. 26 (3), 343-359.
- Budi Shanti. 2001. *Kuota Perempuan Parlemen: Jalan Menuju Kesadaran Politik*, Jakarta: YPJ dan IDEA.
- Caleg wanita di nomor 1, PDIP, PKS paling sedikit, Jawapos, 1 november 2008, hal 2)
- Data statistik, 2003. dalam Budi Rajab, *Perempuan dalam Politik*. <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1003/22/0801.htm>.
- Durkin, K. 1995. *Development Social Psychology*, USA : Blackwell Publisher, Inc.
- Fakih, M. 1996. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Hastuti, M.M. (1993). *Peranan Persepsi Mengenai Keahlian Sifat dapat Dipercaya dan Penampilan Konselor Terhadap Sikap Penerimaan Para Siswa SMA Swasta di Yogyakarta*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Hatfield, E. and Sprecher, S. 1995. Men's and Woman's Preferences in Marital Partners In The United States, Russia, and Japan. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 26 (6), hlm.730.
- Hidayah. 2007. Perbedaan Persepsi Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen di tinjau dari Jenis Kelamin. UIN Malang.
- Kail, R.V; Wick. R & Nelson. 1993. *Development Psychology*, USA : Prentice-Hall. Inc.
- Marry B. Hariss, 1995. Ethnicity, Gender and Evaluation of Aggression, *Journal : Behavior*, 21, 345-357.

- Mary O'Brien. 2003. dalam Adriana Venny. *Menuju Politik yang Lebih Berperspektif Perempuan*. www.compass.co.id.
- Matsumoto, David 1996, *Cross Cultural Psychology*, California: Brook Cole Publishing Company, hlm.220
- Moskowitz, J.M., and Orgel, A.R., 1969. *General Psychology: A Core Text in Human Behavior*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Nurliah Nurdin 2003. *Menggugat Marjinalisasi Perempuan di Parlemen*. [Http://situs.kesrepro.info/gendervaw/okt/2002/gendervaw01.htm](http://situs.kesrepro.info/gendervaw/okt/2002/gendervaw01.htm).
- Redjeki, Sri. 2003. Menteri Pemberdayaan Perempuan. *kebijakan keenterian pembudayaan perempuan dalam peningkatan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan*. Semlokas.
- Seda, Ari, 2004. dalam cokorda yudistira, *Perempuan Indonesia (masih) Minoritas dalam Politik*. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0207/22/dikbud/pere36.htm>.
- Soetandyo Wignyo Soepuro 2003. *Permasalahan Gender dalam Kehidupan Demokrasi*. Malang : Semlokas
- Somasir, Osbin. 2003. *Pemilu 2004 Perempuan Masih Berada di Pinggiran*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sugiarti.2003. *Pengarusutamaan Gender dan Kemandirian Politik Perempuan Indonesia*. Malang: Semlokas
- Sumaryato. 2004. *Agenda Khusus Implementasi Kkg dan Pug Menyongsong Pemilu*. Jakarta: KPPP.
- Turner. P.J. & Gervai, J. 1995. A. *Multidimensional Study of Gender Typing in Prescholl Children and Their Parent : Personality, Attitudes, Preferences, Behavior and Cultural Differences*, *Developmental Psychology*. 31 (5), 759-772.
- UU Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Pasal 65 Ayat 1
- William, J.E. & Deborah L.B. (1990). *Sex and Pscyche : Gender and Self Viewed Cross Culturally*. California : Sage Publications. Inc.